



Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* Desa Sintuwulemba Kecamatan Lage Kabupaten Poso

Rilfayanti Thomassawa^{a,1*}, Herlan Lagantondo^{b,2}

^{a, b} Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ ipapoonya@gmail.com*, ² herlanlagantondo5@gmail.com

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 24-08-2020

Disetujui: 28-09-2020

Kata Kunci:

Kepemimpinan Kepala Desa,
Good Governance

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan penelitian ini mencoba menguraikan fakta-fakta tentang Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Sintuwulemba. Transparency, Participation, Rule of law, Responsiveness merupakan Prinsip-prinsip tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik Good Governance menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan yang demokrasi dan baik terutama di dalam pemerintahan desa dan bagaimana kepala desa dapat mengimplementasikan suatu kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suasana yang terjadi di lapangan berdasarkan data-data, perilaku, ucapan, dan tulisan yang diamati. Metode wawancara digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa Sintuwulemba sudah menggunakan gaya kepemimpinan yang Demokratis dan dalam menjalankan pemerintahannya.

Abstract: The purpose of this study is to describe the facts about the Role of Village Head Leadership in realizing Good Governance in Sintuwulemba Village. Transparency, Participation, Rule of law, Responsiveness are the principles regarding the implementation of better government Good Governance become the main foundation in running a government which is democratic and good, especially in village government and how the village head can implement a policy and service to village community. Qualitative descriptive method is used in this study, namely describe the atmosphere occurs in the field based on the observed data, behavior, speech, and writing. The interview method was used as the main technique of data collection. The results of this study indicate that the leadership style of the Sintuwulemba village head has used a democratic leadership style and in running his government



PENDAHULUAN

Pasca runtuhnya kekuasaan pemerintah orde baru, membawa perubahan baik dalam sendi pemerintahan maupun politik. Isu desentralisasi dan demokratisasi makin keras disuarakan hal ini kemudian berdampak pada pemerintahan (Legislatif dan Eksekutif). Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah kabupaten dan kota dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, Negara kesatuan republik indonesia, dan bhineka tunggal ika. Ketentuan diatas menegaskan kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang terletak di wilayah kabupaten/kota, desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita

kemerdekaan berdasarkan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Penerapan *good governance* di level desa merupakan sebuah solusi canggih terhadap *good governance* yaitu sebuah pemerintahan desa yang di dominasi oleh kepala desa beserta elit desa, yang kurang berbasis kepada partisipasi masyarakat serta transparansi, akuntabilitas, dan responsitas yang terbatas. Sehingga melalui penerapan prinsip *good governance* tidak akan muncul lagi pola kepemimpinan desa yang *benevolent*, *mandatory* dan *otoriter* dari kondisi struktur desa yang *elit*, *sentralistik*, dan *feodal*, sebaliknya akan muncul kepemimpinan sosial yang *partisipatif*, *renponsif* dan *demokratis*. Dengan *good governance* warga desa akan mempunyai ruang dan kapasitas yang leluasa untuk bersuara, akses dan kontrol. Dalam mendukung terwujudnya semua partisipasi, tugas dan wewenang para aparat desa, dan meningkatkan peran dari kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa, maka diperlukan adanya pembentukan atau penerapan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditingkat lokal seperti desa, agar tercipta kesejahteraan sosial, baik dari segi ekonomi, politik dan sosial.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti tentang peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik di desa Sintuwulemba serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik di desa Sintuwulemba..

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menuliskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian, dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dasar penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penulisan dekriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu analisis terhadap peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *Good Governancedesa* Sintuwulemba kecamatan Lage kabupaten Poso..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kepala Desa

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh, mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat tersebut, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa, selain yang ditentukan di dalam Undang-Undang juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kemampuan yang diembannya.

Kepemimpinan (*leadership*), secara umum merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut mengikuti apa yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan.

Dari tugas dan kewajiban yang ada di dalam peraturan pemerintah dan daerah, sama halnya dengan tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa Sintuwulemba, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pendekatannya terhadap masyarakat yang harus lebih diterapkan, karena dengan lebih dekat kepada masyarakat desa Sintuwulemba, kepala desa lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintahan desa. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) kepemimpinan kepala desa menjadi salah satu aktor penting, dimana kepemimpinan kepala desa diharapkan mampu menjadi panutan dan dapat menjalankan pemerintahan desa ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu kepala desa harus mampu menjalankan tugas dan kewajiban serta fungsinya sebagai pemimpin. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governannce*) pemerintahan desa harus bisa memegang prinsip-prinsip dari *good governannce* tersebut. Dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut kepala desamenjadi faktor utama agar dapat berjalannya pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang terbuka (*transparency*), adalah tujuan dari seluruh warga desa, dimana supaya pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah dapat dikontrol oleh masyarakat, dan dapat diketahui oleh seluruh warga masyarakat sejauh mana kinerja oleh aparatur pemerintah. Demokrasi adalah salah satu faktor yang mendukung adanya keterbukaan (*transparency*) terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh suatu negara, agar tercipta kesejahteraan, dan tujuan bersama antara warga masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), juga merupakan salah satu konsep-konsep untuk menunjang agar terciptanya pemerintahan yang baik didalam desa, maka dengan demikian peran kepala desa menjadi faktor utama agar mendukung terciptanya pemerintahan yang baik didalam desa, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terhadap peran kepemimpinan kepala desa, bagaiman perannya dalam menciptakan pemerintahan yang trasparan, terbuka, (*transparency*).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dari data-data yang didapatkan dari wawancara, menyimpulkan ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa Sintuwulemba dalam menjalankan pemerintahan desa supaya berjalan dengan baik dan terbuka, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan wawancara terhadap berbagai pihak seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan jawaban bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa, kepala desa selalu menjaga agar tetap terjalinnya keharmonisan di dalam masyarakat dengan aparatur pemerintahan, seperti selalu melakukan sosialisai terhadap masyarakat dari setiap peraturan yang akan ditetapkan didalam desa, lebih banyak turun kelapangan untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalam desa Sintuwulemba, tidak pernah pilih kasih dalam melakukan peraturan yang akan dibuat, antara (dusun) yang satu dengan yang lain mempunyai peraturan yang sama. Namun sebelum melaksanakan peraturan tersebut kepala desa selalu

melibatkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dengan diskusi umum yang terbuka kepada setiap warga masyarakat, dan bebas mengajukan pendapat. Setelah itu baru dipertimbangkan dulu sebelum peraturan tersebut dilaksanakan. Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan didalam desa, baik yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat maupun pembangunan didesa harus diketahui masyarakat. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan desa selalu dijelaskan lebih dahulu kepada masyarakat, atau dilampirkan di papan informasi, agar masyarakat tahu dengan jelas maksud dan tujuan suatu kebijakan tersebut. Sebelumnya masyarakat diberi informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya secara terbuka”. (Hasil Wawancara dengan Kaur Tata Usaha dan Umum).

Sekretaris desa juga melihat bahwa peran kepala desa sangat besar dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka (*transparency*). “Dalam menjalankan pemerintahan desa yang terbuka dan bersih kepala desa selalu melihat kebawah, yang artinya bahwa kepala desa selalu mengajak aparatur desa, bahkan selalu mengajak BPD untuk saling membantu menciptakan pemerintahan yang terbuka dan bersih. Kepala desa selalu menyarankan agar selalu menjalankan dengan tujuan untuk kemajuan desa, agar semua warga masyarakat dapat percaya dan tidak ada kecurigaan dalam menjalankan pemerintahan dengan selalu memberikan informasi yang lengkap terhadap masyarakat tentang segala rencana yang akan dibuat di dalam desa. Kewibawaan kepala desa, dan gaya kepemimpinannya yang demokratis semakin membuat bawahannya dan masyarakat merasa senang dan selalu menjalankan perintah dari kepala desa dengan melihat tujuannya.

Peran kepala desa dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka yaitu memberikan kebebasan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berhak mengetahui segala informasi dan memberikan ruang untuk dapat berperan di dalam setiap kebijakan di dalam desa”. (Hasil wawancara Sekretaris Desa).

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis, bahwa kepala desa Sintuwulemba mempunyai gaya kepemimpinan yang demokratis dan memiliki kewibawaan yang tinggi dimata aparatur pemerintahan desa, baik BPD, maupun masyarakat Sintuwulemba. Dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka kepala desa mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat menjalankannya secara terbuka dan bersih, dengan cara selalu memperhatikan kinerja dari aparatur pemerintahan desa, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut didalamnya, dan yang lebih penting selalu memberikan informasi yang jelas dan nyata terhadap masyarakat agar tidak adanya saling kecurigaan.

Dalam hal ini, kepala desa harus bisa menjadi panutan terhadap aparatur pemerintahan desa, agar bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan warga masyarakat desa. Upaya pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak, secara lisan maupun elektronik, merupakan contoh wujud nyata prinsip keterbukaan dan transparansi. Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam urusan pemerintahan akan menyebabkan kesalah pahaman terhadap berbagai kebijakan desa yang dibuat. Dalam menjalankan pemerintahan desa kepala desa Sintuwulemba menjalankan prinsip dari *good governance*, yaitu menjalankan pemerintahan yang terbuka (*transparency*).

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa kepala desa Sintuwulembaselalu melakukan musyawarah dengan semua elemen, dalam hal penyusunan program kerja, dan menjalankan kebijakan yang akan dilaksanakan, kepala desa Sintuwulemba sangat membutuhkan dan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Dalam musyawarah atau diskusi umum yang disebut masyarakat inilah yang menjadi tempat bagi kepala desa untuk memberikan penjelasan dan pengajaran kepada masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi, baik dari segi pembangunan, sosial, politik.

Dengan melakukan diskusi umum atau musyawarah masyarakat mendapatkan pelajaran dan pengetahuan tentang pemerintahan desa, dan perpolitikan di dalam desa, sehingga warga masyarakat menjadi tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan desa, dan pemerintahan, kepala desa melihat bahwa warga masyarakat lebih tahu apa yang dibutuhkan mereka. seperti partisipasi dalam hal menjaga kebersihan, adanya kontrol terhadap pemerintahan desa jika tidak sesuai dengan kepentingan desa. dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kepala desa selalu melakukan diskusi atau musyawarah umum, agar mendongkrak kesadaran warga masyarakat desa akan pentingnya kerjasama dalam menjalankan pemerintahan, dan diharapkan ikut berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan demi terjalannya keharmonisan di dalam desa, dan agar berjalan pemerintahan yang bersih dan terbuka.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala desa adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu pemerintahan desa, Kepala Desa Sintuwulemba sudah menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis.
2. Transparansi (*Transparency*). dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan sejauh ini sudah dianggap berhasil
3. Partisipasi (*participation*). Kepemimpinan Kepala desa Sintuwulemba selalu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan, diskusi dan musyawarah. Partisipasi masyarakat desa sangat aktif terhadap pemerintahan desa, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik.
4. Aturan hukum (*Rule of Law*). Dalam menjalankan aturan hukum yang adil dapat terlihat kepala desa selalu melakukan pembimbingan atau memberikan motivasi dan dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan satu sama lain
5. Responsif (*Responsiveness*). Bahwa pelayanan pemerintahan desa sudah dapat dirasakan oleh masyarakat dengan baik, dan selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi

1. Gaya kepemimpinan kepala Sintuwulemba dalam menjalankan pemerintahannya selalu bersifat demokratis, baik sebelum membuat keputusan, proses pembuatan keputusan maupun pelaksanaan keputusan

2. Komunikasi yang dibangun oleh kepala desa Sintuwulemba sangat intens dan dan akrab.
3. Partisipasi masyarakat desa sangat tinggi dan aktif dalam pemerintahan desa, hal itu terlihat dari gotong royong yang sering dilakukan di dalam desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tahir. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dwipanaya Ari. 2003. *Membangun Good Governancedi Desa*. Yogyakarta: IRE.
- Daim, A. Nuryanto, 2014. *Hukum Administrasi*: Surabaya. Laskambang Justitia.
- I Nyoman, Beratha. 1992. *Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, kartini. 1994. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Raharja, Prathama. 2001. *Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: UI.
- Syafiie, Kencana Inu. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sedarmayani. 2003. *Good governance (pemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Subarsono, Ag. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Sunarjo, unang, RH. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Sutarto. 1998. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sutinah, dan Bagong Suyanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Purnomo, Joko, Dkk. 2008. *Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. (Pelaksanaan good governance di desa)*. Yogyakarta: IRE.
- Nugroho, Rianto. 2008. *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Wahjosumidjo, 1987. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widodo Joko, 2001. *Good Governance. Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Insan Cendekia.
- Widjaja AW. 2004. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, Haw. 2008. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Rafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Tentang Desa.